

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Pendidikan (Variabel Dependen/ X_1)

Pendidikan merupakan berbagai usaha formal maupun informal untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari suatu bidang. Semakin terdidik seseorang maka semakin banyak ilmu yang dimilikinya. Melalui pendidikan, pengetahuan dan pemahaman seseorang dalam bidang tertentu menjadi semakin baik, sehingga kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan juga akan semakin baik maupun kemampuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa akan semakin tinggi. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu kunci utama bagi percepatan dan pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan kesejahteraan penduduk pada khususnya. Kemajuan ekonomi suatu negara berarti terjadinya penyediaan lahan pekerjaan dan sumber utama pendapatan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti makin mempercepat penambahan kebutuhan tenaga kerja dan juga menaikkan pendapatan negara

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan salah satu indikator yang dijadikan ukuran pokok kualitas pendidikan formalnya. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu negara seharusnya berdampak pada semakin tingginya taraf intelektualitas negara tersebut. Disadari bahwa upaya pembangunan khususnya di daerah

dapat dipacu dengan mengutamakan pembangunan manusia melalui pendidikan. semakin tinggi pendidikan tingkat pendidikan maka semakin besar akses dan peluang untuk berkembang dalam era globalisasi yang semakin nyata. Berikut data pendidikan berdasarkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki (SLTA ke atas) masyarakat kota Banjarmasin :

Tabel 4.1. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki Kota Banjarmasin

Tahun	SLTA ke atas (%)
2007	40,00
2008	44,80
2009	45,70
2010	40,20
2011	39,20
2012	46,50
2013	44,6
2014	41,5
2015	49,14
2016	47,34

Sumber : BPS Provinsi Kalsel Tahun 2018

2. Upah Minimum Provinsi (Variabel Dependen/ X^2)

Untuk melindungi para buruh, pemerintah menentukan dengan Undang-undang suatu tingkat upah minimum yang harus dibayar oleh pengusaha kepada buruhnya. Pengusaha tidak boleh membayar upah buruh lebih rendah daripada tingkat upah minimum regional tersebut. Tingkat Upah Minimum Regional (UMR) atau sekarang lebih dikenal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) berbeda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Upah Minimum Provinsi dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. adapun komponen KHL yang digunakan adalah 60 komponen meliputi

Makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan rekreasi dan tabungan. Adapun perkembangan mengenai upah minimum provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Data Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan

Tahun	UMP
2007	Rp 745.000,00
2008	Rp 825.000,00
2009	Rp 930.000,00
2010	Rp 1.024.500,00
2011	Rp 1.126.000,00
2012	Rp 1.225.000,00
2013	Rp 1.337.500,00
2014	Rp 1.620.000,00
2015	Rp 1.870.000,00
2016	Rp 2.085.050,00

Sumber : BPS Kalsel Tahun 2018

3. Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Dependen/ X_3)

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan sebuah skema pengurangan angka pengangguran. Pertumbuhan yang tinggi diharapkan akan menciptakan pertumbuhan *output* sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengejar kapasitas *output* yang meningkat itu. Adapun data perkembangan mengenai pertumbuhan ekonomi kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Data Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin

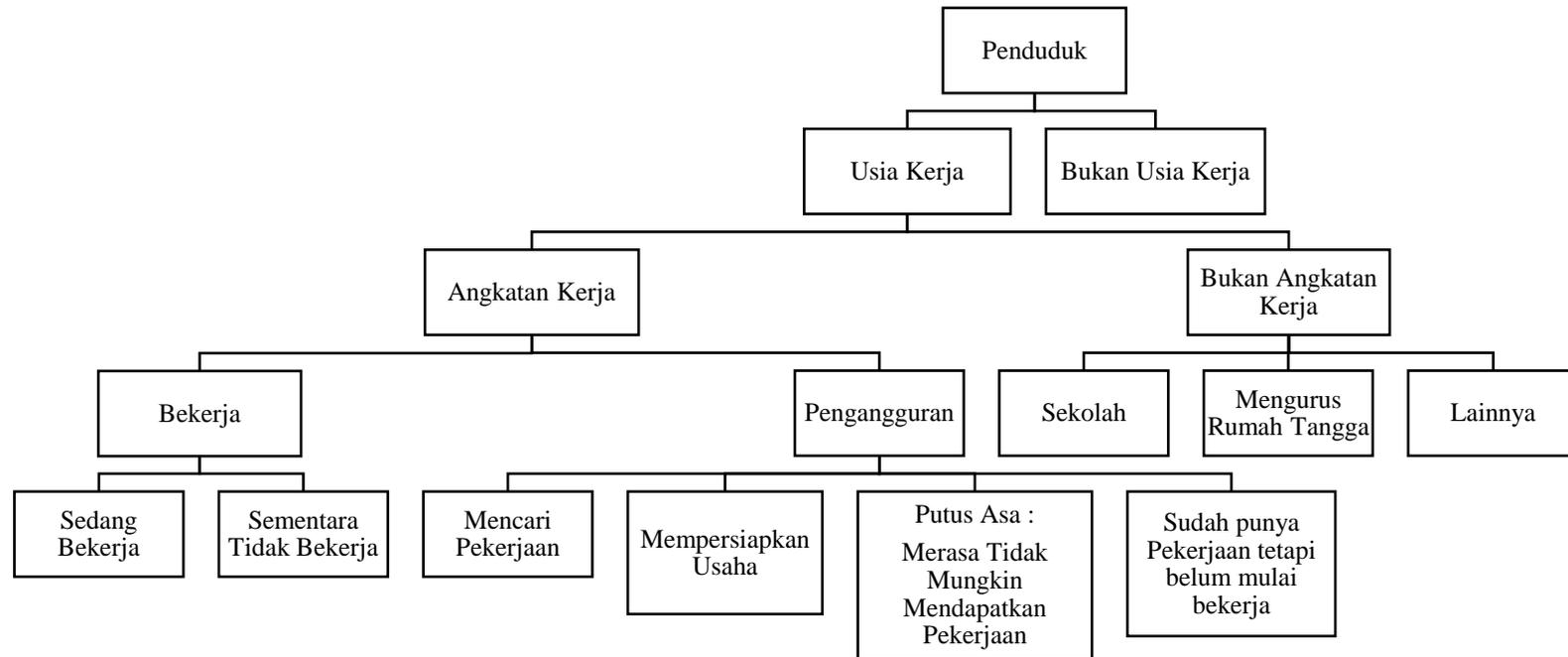
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007	6,40
2008	6,01
2009	6,71
2010	6,47
2011	5,15
2012	6,18
2013	6,93
2014	6,11
2015	5,79
2016	6,28

Sumber : BPS Kalsel dan BPS Banjarmasin Tahun 2018

4. Pengangguran

Data pengangguran merupakan data ketenagakerjaan yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment, and Under Employment: An ILO Manual on Concepts and Methods*”, ILO, 1992. Dalam mengukur pengangguran BPS menggunakan pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*).¹

¹ BPS Provinsi Kalimantan Selatan, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan*, tahun 2016, hlm. 11.



Gambar 4.1. Konsep Dasar Angkatan Kerja

Sumber : BPS Kalsel, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Kalimantan Selatan*, tahun 2016, hlm.11

Adapun penjelasan dari konsep yang digunakan BPS adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas
2. Penduduk Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (olahraga, kursus, piknik dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).
3. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/ karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
4. Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja dengan alasan seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Tidak termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja (sesuai konsep ILO, hal 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Contoh:

- a. Pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
 - b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit, atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah).
 - c. Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya, Misalnya: dalang, tukang cukur, tukang pijat, dan sebagainya.
5. Pengangguran terdiri dari :
- a. Mereka yang sedang mencari pekerjaan.
 - b. Mereka yang sedang mempersiapkan usaha.
 - c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
 - d. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
6. Pekerja dengan jumlah jam kerja di bawah jam kerja normal adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah jam kerja normal (kurang 35 jam seminggu) terdiri dari:
- a. Setengah Pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau masih bersedia menerima pekerjaan.

- b. Pekerja Paruh Waktu (*part time worker*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) tetapi tidak mencari pekerjaan atau sedang tidak mempersiapkan usaha atau tidak lagi bersedia menerima pekerjaan lain.

6. Periode Referensi

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. BPS menggunakan periode referensi satu minggu yang lalu karena paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Kriteria satu jam secara berturut-turut juga digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan, termasuk di dalamnya pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.²

7. Pengangguran Terdidik (Variabel Dependen/Y)

Tingginya pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang tamat pendidikan diploma ke atas (sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut. Sehingga berdasarkan subjek penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

²BPS Provinsi Kalimantan Selatan

$$\text{Tingkat Pengangguran Terdidik} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran SLTA keatas}}{\text{Angkatan Kerja SLTA keatas}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah data yang menggambarkan Tingkat Pengangguran Terdidik di kota Banjarmasin :

Tabel 4.4. Tingkat Pengangguran Terdidik Kota Banjarmasin

Tahun	Tingkat Pengangguran Terdidik (%)
2007	12,81
2008	13,06
2009	10,08
2010	8,07
2011	13,70
2012	7,78
2013	4,77
2014	5,91
2015	8,76
2016	7,34*

Sumber : BPS Kalsel Tahun 2018, *data diolah*

*data sementara menggunakan trend parabola

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nordiana data untuk data pengangguran tahun 2016 menggunakan data ramalan dikarenakan BPS tidak melakukan survei angkatan kerja nasional (sakernas) dikarenakan terbatasnya biaya dari pusat sehingga untuk estimasi sakernas hanya dilakukan pada tingkat provinsi Kalimantan Selatan sehingga untuk estimasi tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan. Namun untuk keperluan penelitian maka diperbolehkan melakukan trend (peramalan) dengan syarat diberi keterangan (tanda bintang) pada data bersangkutan bahwa data tersebut bukan bersumber dari BPS.³ Dengan kata lain data berasal dari ramalan menggunakan trend non linier atau parabolik. Untuk perhitungan trend lebih jelasnya dapat dilihat di lampiran.

³Nordiana Kurniawati, Kepala Diseminasi dan Layanan Statistik, *Wawancara Pribadi* Banjarbaru, 27 April 2018.

B. Analisis Data

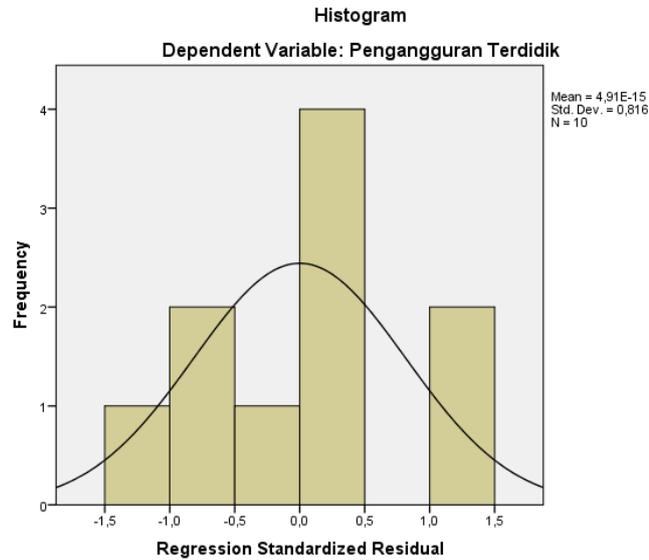
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda yang merupakan persamaan regresi dengan 2 atau lebih variabel untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Uji Asumsi Klasik

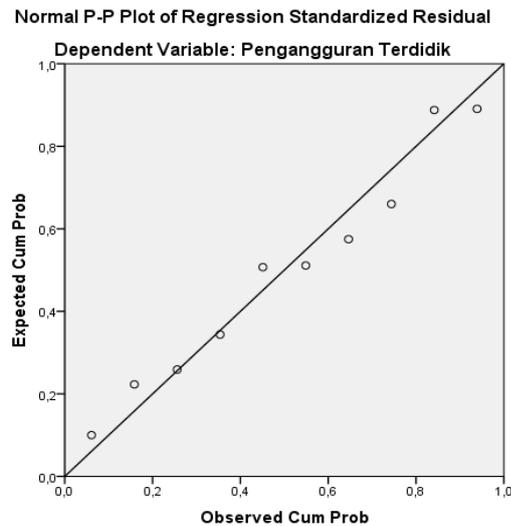
Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, data terlebih dahulu melewati persyaratan kelayakan data dengan menggunakan uji asumsi klasik, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.



Gambar 4.2. *Histogram*



Gambar 4.3. *Plot Normal Distribution*
Sumber :Data diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil *output* SPSS, pada *Plot Normal Distribution* data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolineritas

Untuk menguji adanya kasus multikolineritas adalah patokan nilai VIF (*Variance inflastion factor*) dan koefisien antarvariabel bebas dengan ketentuan :

- Apabila $VIF > 10$ dan $Tolerance < 0,1$, maka tergejala Multikolineritas.
- Apabila $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$, maka tidak tergejala Multikolineritas

Tabel 4.5. Nilai *Tolerance* Dan VIF

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Tingkat Pendidikan	.637	1.569
Upah Minimum	.645	1.549
Pertumbuhan Ekonomi	.894	1.119

Sumber : Data yang diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil SPSS yang menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (0,637;0,645;0,894 > 0,1) dan nilai VIF yang kurang dari 10 (1,569;1,549;1,119 <10) sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak tergejala multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Adapun uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji durbin watson. Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut :

- $DU < DW < 4 - DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- $DW < DL$ atau $DW > 4 - DL$, maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- $DL < DW < DU$ atau $4 - DU < DW < 4 - DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Tabel 4.6. Nilai Durbin Watson (DW)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.878 ^a	.770	.656	1.81757	1.020

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan

b. Dependent Variable: Pengangguran Terdidik

Sumber : Data yang diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil output SPSS pada kolom durbin watson angka yang diperoleh ialah 1,020. Angka DL dan DU yang diperoleh dari tabel durbin watson. Untuk penelitian ini $k= 3$ dan $n = 10$ sehingga diperoleh angka DL = 0,5253 dan DU = 2,0163.

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan diperoleh $DL < DW < DU$ ($0,5253 < 1,020 < 2,0163$) sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti. Untuk memperbaiki dan memastikan model regresi ini bebas dari gejala autokorelasi maka digunakan uji yang lain yakni uji run test.

Tabel 4.7. Nilai Statistik Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.04127
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	3
Z	-1.677
Asymp. Sig. (2-tailed)	.094

a. Median

Sumber: data yang diolah tahun 2018

Berdasarkan output di atas yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig.) lebih dari 0,05 ($0,094 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. dengan ketentuan jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residual lebih dari 0,05 ($>0,05$) maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.8. Nilai Statistik Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.116	5.253		-.593	.575
Tingkat Pendidikan	-.050	.115	-.191	-.431	.681
Upah Minimum	5.967E-007	.000	.301	.681	.521
Pertumbuhan Ekonomi	.911	.673	.507	1.353	.225

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data yang diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil output SPSS dengan uji glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi ketiga variabel bebas/ independen dengan melihat kolom Sig. lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

a. Persamaan Regresi

Dalam penelitian terdapat 3 variabel bebas yakni tingkat pendidikan (SLTA ke atas), upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi serta 1 variabel terikat, yaitu pengangguran terdidik.

Tabel 4.9. Nilai Koefisien Regresi Untuk Pendidikan, Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,916	3,256		4,581	,004
Ln_X1	1,332	,930	,301	1,432	,202
Ln_X2	-,878	,211	-,864	-4,165	,006
Ln_X3	-3,006	,768	-,713	-3,912	,008

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber :Data yang diolah tahun 2018

Berdasarkan data di atas, maka persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y = 14,916 + 1,332 \text{ Ln } X1 - 0,878 \text{ Ln } X2 - 3,006 \text{ Ln } X3 + e$$

Adapun keterangan dari persamaan di atas dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 14,916 menunjukkan apabila tidak ada variabel independen, maka pengangguran terdidik sebesar 14,916.
- 2) β_1 sebesar 1,332 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat pendidikan (lulusan SLTA ke atas) sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan pengangguran terdidik sebesar 1,332% dengan asumsi variabel lain tetap. Sebaliknya setiap penurunan tingkat pendidikan sebesar 1% maka akan diikuti penurunan pengangguran terdidik sebesar 1,332%.

- 3) β_2 sebesar $-0,878$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1% maka akan diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran terdidik sebesar 0,878% dan sebaliknya setiap penurunan upah minimum provinsi sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah pengangguran terdidik sebesar 0,878%. Dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) β_3 sebesar $-3,006$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran terdidik sebesar 3,006% dan sebaliknya ketika pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah pengangguran terdidik sebesar 3,006% dengan asumsi variabel lain tetap.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.10. Koefisien Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,908 ^a	,825	,738	,17900

a. Predictors: (Constant), Ln_X3, Ln_X2, Ln_X1

Sumber : data yang diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil output SPSS kolom R Square menunjukkan angka sebesar 0,825 atau sebesar 82,5% yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari tingkat pendidikan, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan variabel dependen yakni tingkat pengangguran terdidik (SLTA +) sebesar 82,5% sedangkan sisanya sebesar 17,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Uji F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, yang ditunjukkan dalam tabel anova. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig. < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $sig. > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.11. Nilai F Hitung Terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.908	3	.303	9.444	.011 ^b
	Residual	.192	6	.032		
	Total	1.100	9			

a. Dependent Variable: Ln_Y

b. Predictors: (Constant), Ln_X3, Ln_X2, Ln_X1

Sumber :Data yang diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil SPSS pada kolom F yang menunjukkan F hitung sebesar 9,444 dan F tabel diperoleh dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 6$ ($n-k-1 = 10-3-1=6$) dan $\alpha = 5\%$ sebesar 5,14.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga menolak H_0 . Dan nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik.

b. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, ditunjukkan oleh tabel coefficients. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan nilai $\text{sig.} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan nilai $\text{sig.} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.12. Nilai T Hitung Terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	14,916	3,256		4,581	,004
	Ln_X1	1,332	,930	,301	1,432	,202
	Ln_X2	-,878	,211	-,864	-4,165	,006
	Ln_X3	-3,006	,768	-,713	-3,912	,008

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber :Data yang diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas secara individual dapat diketahui hubungan setiap variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1) Variabel Tingkat Pendidikan (SLTA+)

Pada kolom t yang menunjukkan angka t hitung sebesar 1,432 dan angka dari t tabel dengan rumus $df = 6$ ($n-k-1 = 10-3-1 = 6$) dan $\alpha = 5\%$ ($0,05/2 = 0,025$) diperoleh angka sebesar 2,447. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ sehingga gagal menolak H_0 . Selanjutnya untuk nilai signifikansi sebesar $0,202 > 0,05$ sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel pendidikan secara parsial atau individu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik.

2) Variabel Upah (Upah Minimum Provinsi)

Pada kolom t yang menunjukkan angka t hitung sebesar -4,165 dan angka dari t tabel dengan rumus $df = 6$ ($n-k-1 = 10-3-1 = 6$) dan $\alpha = 5\%$ ($0,05/2 = 0,025$) diperoleh angka sebesar 2,447. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa t hitung $>$ t tabel sehingga H_0 ditolak. Selanjutnya untuk nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum provinsi secara parsial atau individu berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik.

3) Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Pada kolom t yang menunjukkan angka t hitung sebesar -3,912 dan angka dari t tabel dengan rumus $df = 6$ ($n-k-1 = 10-3-1 = 6$) dan $\alpha = 5\%$ ($0,05/2 = 0,025$) diperoleh angka sebesar 2,447. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa t hitung $>$ t tabel sehingga H_0 ditolak. Selanjutnya untuk nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial atau individu berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik.

Adapun intisari atau penjelasan mengenai hasil regresi adalah sebagai berikut berdasarkan penjabaran teori adalah sebagai berikut :

- Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran Terdidik di Kota Banjarmasin

Untuk variabel tingkat pendidikan (lulusan SLTA ke atas), didapatkan hasil besarnya nilai probabilitasnya ($0,202 > 0,05$), yang artinya pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di kota Banjarmasin. Dan untuk nilai β sebesar 1,332, artinya ketika pendidikan naik 1% maka jumlah pengangguran terdidik lulusan universitas akan mengalami peningkatan sebesar 1,332%. Nilai positif dari koefisien tingkat pendidikan menunjukkan hubungan yang searah dengan pengangguran terdidik, apabila lulusan pendidikan SLTA ke atas mengalami kenaikan maka semakin tinggi jumlah pengangguran terdidik dan sebaliknya walaupun pengaruhnya tidak signifikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Ajeng Rahayu (2017) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pengangguran Terdidik Di Pulau Sumatera Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini bahwa tingkat pendidikan (Diploma dan Universitas) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera.

Hal ini sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh Elwin Tobing bahwa pengangguran terdidik cenderung disebabkan oleh ketidakcocokan

antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dan kesempatan kerja yang tersedia (sisi permintaan tenaga kerja). Ketidakcocokan ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status, dan masalah keahlian khusus. Selain itu, kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi secara teoritis seharusnya cenderung lebih terbuka, sehingga tingkat pengangguran dari kelompok ini cenderung lebih kecil daripada kelompok yang berpendidikan lebih rendah. Namun demikian, kesempatan kerja itu akan menyempit seiring dengan meningkatnya jumlah lulusan dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut fakta yang terjadi adalah semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman, sehingga angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

- Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Pengangguran Terdidik

Untuk variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), didapatkan hasil besarnya nilai probabilitasnya ($0,006 < 0,05$), yang artinya UMP berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di kota Banjarmasin. Dan untuk nilai β sebesar $-0,878$, artinya ketika UMP naik 1% maka jumlah pengangguran terdidik akan mengalami penurunan sebesar 0,878%. Nilai negatif dari koefisien UMP menunjukkan hubungan yang terbalik dengan pengangguran terdidik, artinya apabila UMP

mengalami kenaikan maka semakin rendah atau berkurang jumlah pengangguran terdidik dan sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rosdiana (2017) Analisis Pengaruh Upah Minimum (UMP) Dan Mutu Sumber Daya Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Pengangguran Terdidik Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2015, Hasil penelitian ini telah menggunakan hipotesis bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. Apabila tingkat UMP naik maka akan menurunkan jumlah pengangguran terdidik.

Penelitian yang serupa juga oleh Nila Ayu Islamia (2017) Analisis Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa Tahun 2008-2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik lulusan universitas. Artinya ketika besarnya UMP semakin meningkat maka jumlah pengangguran terdidik lulusan universitas akan mengalami penurunan.

Adapun teori yang menjelaskan adanya hubungan terbalik antara upah dan pengangguran adalah A.W. Phillips (Kurva Phillips) mengatakan bahwa Upah mempunyai hubungan yang terbalik dengan tingkat pengangguran (negatif). Jika tingkat upah naik maka pengangguran akan turun dan sebaliknya jika tingkat upah turun pengangguran akan naik.

Menurut Keynes, penurunan tingkat upah akan menurunkan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat akan menurunkan tingkat

pengeluaran dan berakibat pada turunnya tingkat harga barang dan jasa. Turunnya tingkat permintaan akan berakibat pada penurunan kapasitas produksi yang artinya pengurangan jumlah tenaga kerja. Dengan demikian tingkat upah tidak dapat menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh (*Full Employment*).

- Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terdidik di kota Banjarmasin

Variabel pertumbuhan ekonomi didapatkan hasil besarnya nilai probabilitasnya ($0,008 < 0,05$), yang artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di kota Banjarmasin. Dan untuk nilai β sebesar $-3,006$, artinya ketika pertumbuhan ekonomi naik 1% maka jumlah pengangguran terdidik akan mengalami penurunan sebesar 3,006%. Nilai negatif dari koefisien pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang terbalik dengan pengangguran terdidik, artinya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka semakin rendah atau berkurang jumlah pengangguran terdidik dan sebaliknya.

Penelitian yang serupa juga oleh Nila Ayu Islamia (2017) Analisis Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa Tahun 2008-2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik lulusan universitas. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat

maka jumlah pengangguran terdidik lulusan universitas akan mengalami penurunan.

Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan pada landasan teori yakni hukum Okun yang mengatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Menurut teori ekonomi, terapi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang “berkualitas” dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyediakan kesempatan kerja yang besar yaitu pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh banyaknya investasi yang bersifat padat tenaga kerja, bukan yang bersifat padat modal. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Ketika ekonomi tumbuh, maka terdapat pertumbuhan produksi barang dan jasa. Ketika hal ini terjadi maka kebutuhan akan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa pun akan ikut tumbuh.

4. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pengangguran terdidik

Dalam Islam, pengangguran merupakan hal yang dilarang oleh Allah Swt. Karena pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk bekerja sehingga memperoleh penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya dan menolong sesama

manusia. Bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan mencapai karunia Allah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S.al-Jumu'ah/62:10.⁴

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”

Dalam Islam ketika seseorang tidak mau mempergunakan potensinya maka itulah pengangguran yang amat membahayakan diri dan masyarakatnya. Secara moral Islam orang yang demikian adalah menganggur yang memikul dosa. Sedangkan yang terus memfungsikan potensinya baik modal, tenaga maupun pikirannya tidak termasuk kategori menganggur yang menyalahi ajaran Islam. Ketika seseorang tidak bekerja namun ia masih terus berfikir keras bagaimana bisa memproduktivitaskan dirinya sehingga bisa menghasilkan kerja yang produktif maka ia secara moral Islam memenuhi kewajiban kerja dalam Islam dan tidak menanggung dosa pengangguran.⁵

Berdasarkan penjabaran di atas, jelaslah bahwa kita selaku Muslim dan jika sudah masuk ke dalam golongan angkatan kerja (berumur 15 tahun ke atas dan bukan termasuk ibu rumah tangga, sekolah) dan dianugerahi dengan fisik dan akal yang sehat haruslah wajib bekerja sekurang-kurangnya untuk

⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 103.

⁵Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 138.

memenuhi kebutuhan sendiri sehingga tidak menjadi beban untuk keluarganya.

Bekerja di dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Bahkan tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk beribadah” atau bertawakkal kepada Allah. Tidak dibenarkan pula muslim bersandar pada bantuan orang lain sedangkan ia mampu dan memiliki kemampuan.⁶ Pada dasarnya pengangguran terdidik cenderung masih dibiayai orangtua sehingga mereka tidak merasa memiliki tanggungan dan tanggung jawab. Padahal Allah melarang manusia untuk bermalas-malasan dan hanya berharap kepada orang lain. Apalagi pengangguran terdidik lebih memiliki modal sumber daya manusia yang lebih besar dari pengangguran yang berpendidikan lebih rendah.

Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk belajar. Bahkan dalam Alquran terdapat ayat yang mendorong umat Islam untuk belajar, yakni Q.S, al-‘Alaq /96: 1 dan 3.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan”

أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

“Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah”

Pada ayat pertama dan ketiga berisi tentang perintah membaca dan belajar. Pada ayat ketiga dikaitkan dengan *warabbuk al-akram*. Ayat ini

⁶Yusuf Qardhawi, *op.cit*, hlm.103-104.

merupakan dorongan untuk meningkatkan minat belajar dan *warabbuk al-akram* mengandung pengertian bahwa Dia (Tuhan) dapat menganugerahkan puncak dari segala yang terpuji bagi semua hamba-Nya yang membaca.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa membaca dan belajar merupakan sesuatu yang penting bahkan diperintahkan Allah Swt. Karena dengan belajar maka seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupannya.

Hal ini bahkan dijanjikan Allah kepada mereka yang belajar dengan ikhlas bahwa Allah akan memberikan kepada mereka pemahaman, wawasan dan pengetahuan baru. Karena itu, bacalah berulang-ulang, belajarlah terus menerus, Tuhan kamu akan memberikan manfaat yang banyak dan tak terhingga.⁸ Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak dipraktikkan dengan bekerja. Pengangguran terdidik muncul disebabkan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja yang dicari dengan keterampilan tenaga kerja yang ada, sehingga mereka lebih memilih menganggur dan menunggu pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan *skill* mereka.

Padahal Islam mendesak agar menginvestasikan segenap energi setiap individu dan menggali untuk menemukan bakat setiap individu serta memanfaatkannya, sesuai kadar kemampuan dan usahanya masing-masing, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. *at-talaq/65:7*.

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا ...^ج

⁷Mahyuddin Barni, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Quran; Studi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: PUSTAKA PRISMA, 2011), hlm. 10-12.

⁸*Ibid.*, hlm. 15.

“...Allah tidak membebankan seseorang seseorang kecuali sesuai apa yang diberikan Allah...”

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah telah menganugerahkan energi, kemampuan dan bakat, selanjutnya adalah kewajiban masing-masing individu untuk mengembangkannya dalam menghadirkan kebaikan baik bagi dirinya sendiri maupun sesama manusia.

Hubungan ketenagakerjaan dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Untuk tingkat upah yang adil, hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya sehingga perlu menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.⁹ sebagaimana dalam Q.S. *Hūd*/11:6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَرِزْقُهَا ...

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya...”

Berdasarkan penjabaran di atas bahwa upah minimum merupakan tanggung jawab negara sebagai salah satu cara melindungi hak para pekerja atau buruh akan tetapi dimana upah minimum yang ditetapkan haruslah tetap memperhatikan kemampuan pengusaha. Upah minimum yang ditetapkan didasarkan pada KHL yang selalu ditinjau baik dari segi komponen maupun

⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1995), hlm. 364.

survei harga, akan selalu menunjukkan kenaikan dikarenakan kenaikan harga bahan-bahan pokok atau kebutuhan hidup.

Hal ini sejalan dengan kalimat negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pekerja dari golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat upah minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan tingkat harga dan biaya hidup.¹⁰ Negara selaku wakil Allah di bumi hendaknya memperhatikan kemakmuran rakyatnya salah satunya menjaga kestabilan upah minimum yang layak bagi para pekerja dan tidak memberatkan para pengusaha. Upah minimum yang selalu mengalami kenaikan dikarenakan adanya perubahan tingkat harga dari berbagai kebutuhan pekerja dan biaya hidup yang semakin mahal setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan produksi, namun ditujukan berlandaskan keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *al – ma'idāh* /5:8.

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

“...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...”

Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan. Hal ini berkaitan dengan pengangguran, bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya

¹⁰Afzalur Rahman, *op.cit*, hlm.365.

hendaknya juga berimbans atau memberikan dampak positif bagi masyarakatnya yakni dengan tumbuhnya lapangan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berimbans pada golongan atas tetapi juga akan mengurangi pengangguran yang ada dimasyarakat dengan terciptanya kesempatan kerja.

Dimana dalam perspektif Islam pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor yakni sumber daya yang dapat diinvestasikan, SDM atau *enterpreneurship* dan inovatif.¹¹ Artinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengurangi pengangguran ialah dengan memanfaatkan sumber daya alam namun tetap selalu melakukan perbaikan dan tidak melakukan kerusakan di bumi, adanya SDM yang mendukung dan pengusaha yang inovatif yang mampu mengembangkan bisnis syariah serta mampu mengembangkan potensi lokal dengan selalu menggunakan produk-produk buatan dalam negeri sehingga produksi dalam negeri mengalami kenaikan dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk pekerja lokal. Hal ini tentu saja berhubungan dengan mereka yang berpendidikan tinggi dikarenakan mereka dianggap memiliki SDM yang lebih dari yang berpendidikan rendah, sehingga dengan adanya mereka yang berpendidikan haruslah mampu memberikan inovasi-inovasi yang mampu menciptakan ke arah pembangunan yang lebih baik.

¹¹Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 23.